



Radar Bali

Aset Strategis BUMN PT Berdikari Insurance Terancam Lepas

Sertifikat Atas Nama Anak Sudarmono

Jika melintas di Jalan Teuku Umar, pasti akan pernah melihat papan bertuliskan PT Berdikari Insurance. Tidak banyak yang tahu bahwa kantor asuransi ini adalah BUMN, dan berdiri sejak tahun 1960-an dengan nama awal PT Timur Jauh. Dan, saat ini aset - aset strategis berupa kantor dibidik beberapa pihak. Termasuk lahan kantor PT Berdikari di Jalan Teuku Umar 23, Denpasar.

I KETUT ARI TEJA, Denpasar



KETUT ARI TEJA/RADAR BALI

MAU DILELANG: Kantor PT Berdikari Insurance di Jl Teuku Umar yang mau dilelang besok (12/8).

MASIH ingat dengan hilangnya aset pemerintah berupa areal kampus di Unud, Jimbaran. Bahkan, saat ini sekitar 3 hektare di tengah kampus sudah dikuasai pihak lain. Menariknya, saat mahasiswa dan dosen bersatu demo ke PN Denpasar, tim eksekusi malah dengan leluasa melakukan eksekusi di lokasi lahan Unud. Hal serupa saat ini dialami oleh BUMN PT Berdikari. Asetnya di Jalan Teuku Umar bisa raib.

Siang sekitar pukul 11.30, koran ini memasuki areal kantor PT Berdikari. Suasana asri terlihat dari bangunan ini. Masih ada pohon mangga yang sudah mulai memunculkan buahnya ■

► Baca **Sertifikat...** Hal 31

Edisi : Sekesai, 11 Agustus 2015

Hal : 21



Sambungan - - -

PT Berdikari Laporkan Pidana Penipuan

■ SERTIFIKAT...

Sambungan dari hal 21

Lokasi kantor yang strategis menunjukkan bahwa PT Berdikari, sebagai asuransi plat merah, ini sangat bergengsi di zamannya. Luas arealnya sekitar 6 are lebih. Memasuki pintu kantor, terlihat tulisan yang dipahat di atas marmer. Dengan tulisan "Berdikari Insurance Company". "Silakan Mas, masuk!" ajak Kepala Cabang PT Berdikari Denpasar Maskub saat menemui koran ini. "Ini bangunan hebat dulu Mas, kelihatan kan?" sambungnya.

Dia mengatakan, saat ini aset-aset PT Berdikari sedang dibidik. Yang dipilih adalah posisi aset yang strategis. "Termasuk ini yang di Bali. Tahu lah nilai aset di Jalan Teuku Umar ini berapa saat ini," ungkapnya.

Dia juga mengatakan kantor pusat PT Berdikari di Jakarta juga bukan main strategisnya. Berada di Jalan Merdeka Barat Nomor 1, Jakarta. "Tahu itu posisinya di mana, posisinya di depan istana presiden. Aset ini juga dibidik, ada yang mau ambil," imbuhnya.

Selain itu, aset kantor PT Berdikari di Batam juga dibidik. Bagaimana ceritanya? Berdasarkan penjelasan kuasa hukum, kasus ini berawal dari kerja sama asuransi dengan PT Kaltim Daya Mandiri urusan asuransi mesin. Ternyata ada klaim mesin ru-

sak, namun setelah dilakukan pengecekan, fisik mesin itu tidak ada. Atas kondisi ini terjadi proses hukum, sampai akhirnya ada aset yang akan dilelang milik PT Berdikari. "Proses lelang sudah sempat berjalan di PN Denpasar, namun tidak ada yang berminat," ungkap pengacara PT Berdikari Bima Hartawan.

Dalam perjalanannya, tiba-tiba muncul lagi pengumuman lelang ulang dari Pengadilan Negeri Denpasar yang akan dilakukan pada Rabu 12 Agustus 2015 di PN Denpasar. Dijelaskan dalam pengumuman lelang dengan tanda tangan panitra I Ketut Sulendra, ini yang akan dilelang adalah tanah dan bangunan PT Berdikari di Jalan

Teuku Umar Nomor 23.

Bahkan, sudah dicantumkan limit nilai aset itu sebesar Rp 17,5 miliar dengan uang jaminan sebesar Rp 17,5 miliar. Menariknya dalam pengumuman itu juga disebutkan, terhadap aset tersebut tidak dilengkapi dengan sertifikat. Atas kondisi ini pihak PT Berdikari melakukan perlawanan. Dengan mengatakan bahwa objek lelang tersebut masih proses pemeriksaan persidangan dalam tahap banding. Sebagaimana dengan Perkara Perdata Nomor 254/Pdt.G/2014/PNJkpts dan Perkara Perdata Nomor 512/Pdt.G/2014/PNJkpts.

"Untuk kami sampaikan ke-

pada khalayak ramai, agar tidak melakukan perbuatan hukum atas objek lelang tersebut karena masih dalam perkara banding. Guna menghindari adanya tuntutan pidana dan perdata dari PT Berdikari Insurance," ujar Bima.

Dia juga mengatakan, saat ini masih ada laporan ke Polda Kaltim atas dugaan adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh pihak PT Kaltim Daya Mandiri. Dengan laporan polisi STPL/137/V/2015/SKPT III pada 18 Mei 2015, telah ditindaklanjuti oleh pihak Polda Kaltim. Bahkan, sudah ada hasil pemberitahuan penyidikan nomor B/173/V2015 pada 20 Mei 2015.

Bagaimana dengan sertifikatnya? Dia membenarkan memang sertifikat juga masih ada masalah. Karena sampai saat ini sertifikat atas aset PT Berdikari Insurance di Jalan Teuku Umar ternyata masih atas nama anak dari mantan Wapres Sudarmono. Dengan nama Tanyo Aji Pramudyo Sudarmono. "Sertifikat masih atas nama anaknya Pak Sudarmono. Jadi, sertifikatnya juga masih bermasalah," urainya.

Atas kondisi ini dia menyampaikannya sangat berisiko sampai tanah atau aset ini dilelang. "Sangat berisiko, jika sampai lahan ini dilelang," pungkasnya. (* / yes)



Radar Bali

PARIWISATA

Guide Illegal Diduga Marak di Amed

AMLAPURA - Keberadaan guide (pemandu wisata) illegal diduga marak di objek wisata Amed, Kecamatan Abang, Karangasem. Guide liar ini, sebagian besar diduga sebagai pemandu wisata menyelam (diving) atau dive master. Parahnya lagi, mereka banyak warga negara asing (WNA).

Salah seorang pengusaha diving di wilayah Amed menyebutkan, WNA yang berprofesi sebagai dive master itu, diduga illegal. Untuk itu, pihaknya meminta DPRD Karangasem, termasuk instansi terkait di Pemkab Karangasem, segera turun ke Amed, termasuk objek wisata Tulamben, Kecamatan Kubu. Karena bulan ini, termasuk *moment* yang pas melakukan penertiban guide illegal, karena termasuk ramai wisatawan. "Pemerintah, tolong lah. Sekali-sekali turun ke Amed cek pengusaha diving. Mempekerjakan tenaga asing, sudah ada izin atau belum," jelas sumber yang minta namanya dirahasiakan.

Katanya, keberadaan pemandu wisata liar ini merugikan pengusaha lokal. Karena mereka cenderung banting harga. Modusnya, mereka mengaku mengantar teman, namun itu berlangsung setiap hari. Sehingga pihaknya curiga bahwa ini hanya akal-akalan. Rencananya masalah ini akan diadukan ke Penjabat Bupati Karangasem, Ida Bagus Ngurah Arda, dan dibuatkan sebuah paguyuban.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Karangasem, I Gusti Nyoman Arya Sulang mengakui, masih banyak pekerja asing di Karangasem belum terdata. Cuma, dia enggan merinci lokasi tempat WNA itu bekerja. Alasannya, belum memiliki data valid. Selain itu, pihaknya mengaku minim anggaran. "Yang terdata, hanya 31 orang. Saya yakin lebih banyak dari itu," tegasnya.

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Karangasem, I Wayan Purna mengaku akan mengecek kebenaran itu. Salah satunya dengan mengecek visanya. (wan/yor)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 25



Disorot Dewan Badung karena Bangunan Megah

MANGUPURA - Bangunan megah dengan menelan dana ratusan miliar rupiah, ternyata tidak diimbangi dengan sumber daya manusia (SDM) mumpuni. Kondisi itulah yang terjadi pada RSUD Badung. Rumah sakit yang baru saja bertambah menjadi RSUD Mangusada Badung setelah ditinggal Bupati Badung AA Gde Agung ini sekarang krisis dokter spesialis. Di antaranya; dokter spesialis ahli bedah thorax, dokter ahli bedah onkologi, serta dokter ahli bedah plastik.

Kondisi ini pun mendapat sorotan dari kalangan Dewan Badung, khususnya Komisi IV yang membicarakan kesehatan. Badung yang mempunyai anggaran melimpah, namun tidak bisa mendatangkan dokter spesialis. Bahkan, dokter disebut-sebut tidak mendapat tunjangan layak sebagai seorang dokter spesialis. "Dulu ada dokter spesialis, tapi keluar karena tidak mendapat tunjangan memadai. Bagaimana dokter *nggak* keluar kalau tidak dipelihara dengan baik," sindir Wakil Ketua DPRD Badung, Made Sunarta, ditemui usai melakukan inspeksi mendadak (sidak) di rumah sakit plat merah itu kemarin (10/8).

Menurut Sunarta, keberadaan dokter spesialis sangat penting lantaran RSUD Badung diplot sebagai rumah sakit rujukan. Dengan kondisi yang ada saat ini, pihaknya pun meragukan rumah sakit bisa menjadi ru-

mah sakit rujukan dan bertaraf internasional. Pihaknya pun meminta agar pihak rumah sakit dan Dinas Kesehatan Badung serius menyikapi keberadaan dokter spesialis. "Masak kalah sama Buleleng yang berani kasih tunjangan dokter spesialis sampai Rp 15 juta," sindirnya lagi.

Selain masalah dokter spesialis yang sangat minim, Dewan juga menyoroti peralatan di gedung E Paviliun Mangusada yang baru saja selesai dibangun. Dewan meminta agar gedung E yang menyediakan pelayanan

Mangusada Krisis Dokter Spesialis

VIP, VVIP, dan super VIP harus segera dirampungkan agar bulan Oktober atau November ini bisa beroperasi maksimal.

Hal lain yang juga disoroti adalah masalah pelayanan Jaminan Kesehatan Bali Mandara (JKBM) dan JKKB Manguwaras. Pihaknya mengaku kerap mendapat laporan pasien JKBM dan JKKB tidak lagi gratis. Celakanya lagi, pasien JKKB diberi resep tapi beli obat sendiri. "Mestinya kan pasien JKKB itu gratis semua

Ketua DPRD I Made Sunarta dan Ketua Komisi IV I Nyoman Sutrisno itu diterima langsung oleh Direktur RSUD Agus Bintang Suryadhi, turut hadir anggota Komisi IV; IB Sunartha, Putu Parwata, Luh De Suryani, I Gusti Anom Gumanti, Senata, dan Suraharja.

Di sisi lain, Dirut RSUD Mangusada Badung Agus Bintang Suryadi mengakui bila masih kekurangan dokter spesialis. Dijelaskan Bintang, pihaknya memang kekurangan dokter spesialis seperti dokter ahli bedah thorax, dokter ahli bedah onkologi, dokter ahli bedah plastik, dan lain-lain. "Karena pelayanan di Gedung Paviliun Mangusada bersifat spesialisik dan rencana pengembangan RSUD Mangusada menjadi rumah sakit pendidikan tentu membutuhkan lebih banyak dokter spesialis dan sub spesialis," imbuhnya.

Soal sorotan Dewan masalah tumpang tindih antara pelayanan JKKB Manguwaras dan JKBM, Bintang menyangkal hal tersebut. Menurut dia, JKKB bukan kurang maksimal, hanya prosedurnya harus memakai formularium JKBM dulu. Tidak langsung memakai formularium rumah sakit seperti dulu.

"Pasien yang mendaftar dengan menggunakan JKBM tidak bisa mendapatkan dari JKKB. Sebaliknya juga begitu, kalau mendaftarnya memakai JKKB maka tidak bisa dobel dapat dari JKBM," jelasnya. (san/djo)

Dulu ada dokter spesialis, tapi keluar karena tidak mendapat tunjangan memadai. Bagaimana dokter *nggak* keluar kalau tidak dipelihara dengan baik."

MADE SUNARTA

Wakil Ketua DPRD Badung

karena yang tidak ditanggung JKBM sudah dibiayai dengan JKKB," kata Sunarta.

Terkait hal itu pihaknya me-*warning* pihak rumah sakit agar benar-benar menjalankan program pemerintah. "Ingat JKKB itu adalah suplemen JKBM. Apa yang tidak ditanggung JKBM ditanggung JKKB. Jadi kita minta resep yang dikeluarkan di luar daftar *list* obat agar ada semacam rekomendasi tim medik dan direktur" tegasnya.

Sidak yang dipimpin Wakil



Ribuan Warga Terancam

Krisis Air

MENDOYO - Ribuan warga Desa Yehembang, Kecamatan Mendoyo terancam krisis air bersih. Kondisi tersebut sudah terjadi setiap tahun. Namun kali ini, Pemerintah Desa sudah mendatangkan pipa untuk membantu mengalirkan air bersih bagi ribuan warga di dua dusun yang rawan krisis air bersih.

Data yang diperoleh koran ini menyebutkan, sekitar 350 kepala keluarga di Banjar Kaleran dan sekitar 150 kepala keluarga di Banjar Wali, Desa Yehembang setiap tahun mengalami krisis air bersih. Kondisi ini terjadi karena letak kedua banjar tersebut lebih tinggi dari sumber air khususnya dari Sungai Yehembang. Tahun

sebelumnya, ribuan warga di kedua banjar tersebut harus mendapat pasokan air bersih dari PDAM Jembrana atas permintaan Pemkab Jembrana.

"Tahun ini pasti warga di kedua banjar tersebut akan mengalami kesulitan yang sama. Karena musim kemarau tahun ini sepertinya jauh lebih hebat ketimbang tahun sebelumnya. Air irigasi saja sudah mengering sehingga petani kesulitan mengolah sawahnya," kata seorang warga, I Made Yasa, kemarin.

Meski perkiraan warga mereka bakal kesulitan air bersih, ternyata tidak terjadi seperti yang mereka bayangkan. Sebab Pemerintah Desa Yehembang sudah mengupayakan pipa dan mesin pompa untuk

menyalurkan air bersih ke rumah warga di kedua banjar tersebut. Hal itu dibenarkan Kepala Desa Yehembang, I Made Semadi saat dikonfirmasi, Senin (10/8) kemarin.

Semadi mengaku saat ini pihaknya sudah menganggarkan

sejumlah dana dalam anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) untuk membeli 170 batang pipa. Pipa ini sudah dipasang sejak Senin (10/8) pagi kemarin guna membantu warga yang diprediksi bakal mengalami krisis air bersih. (don/gup)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 29



DITANGKAP DI SIDOARJO: Aristya Agustin Ambarawati akhirnya ditangkap dan langsung menjadi saksi dalam kasus korupsi Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng.

Tersangka Jembatan Ditangkap

Setelah Mangkir Dua Kali Dalam sidang

DENPASAR - Sidang kasus korupsi pembangunan Jembatan Pangkung Lebong dan Pangkung Api di Desa Lemukih, Sawan, Buleleng dilanjutkan kemarin. Aristya Agustin Ambarawati, tersangka yang sempat dua kali mangkir akhirnya datang dan dijadikan saksi untuk terdakwa I Made Suitra pada sidang di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (10/8). Dia bisa datang karena bos CV Aristya Ayu, ini ditangkap di Sidoarjo dan sudah menjalani penahanan sejak Rabu lalu (5/8).

Sebenarnya ada tiga tersangka dalam kasus ini. Pertama adalah PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) Dinas PU Buleleng I Made Suitra, kemudian Direktur PT Aristya Ayu yaitu Aristya dan PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) Wenten. Aristya ini yang kucing - kucingan, dan kemarin akhirnya jadi saksi. Walaupun mengenakan baju bertuliskan "relax" tetap tidak bisa menyembunyikan ketegangannya.

Sidang dipimpin oleh Hakim Ketua Ketut Gede Hariadi, dengan Anggota Petinsilli dan Nurbaya Goal. Jaksa dalam sidang kemarin hadir Agung Alit dkk ■

► Baca **Tersangka...** Hal 31



Radar Bali

Sambungan - -

Aristya Ditangkap di Sidoarjo

■ TERSANGKA...

Sambungan dari hal 21

Saksi dengan gaya rambut nyentrik, ini beberapa kali terpojok dan berusaha berkelit. Dia akhirnya mengakui mengajukan penawaran tanpa melakukan pengecekan lokasi dan baru bekerja 20 persen sudah menerima dana 40 persen. "Saya terkendala lokasi, memang saya tidak melakukan pengecekan lokasi lebih awal," ungkap Aristya.

Beberapa kali juga perempuan asal Sidoarjo, ini dibentak hakim dan diminta jujur. "Kita semua tahu obat sakit kepala ya untuk sakit kepala. Ini kok obat sakit kepala ibu bilang untuk batuk, hakim tahu mekanisme proyek," sentil Hakim Beslin.

Ketua Tim Penyidik Kompiler Made Widia, yang hadir dalam si-

dang mengawal tersangka Aristya mengakui bahwa saksi yang juga tersangka tersebut sudah ditahan. "Ya memang benar sudah ditangkap, sudah ditahan," ungkapnya.

Dia juga mengatakan ditangkap di Sidoarjo. Namun dia enggan memberikan penjelasan rinci atas penangkapan perempuan paruh baya yang terlihat pesolek ini, walaupun sudah mendekam di balik jeruji tahanan.

Namun penjelasan lebih rinci didapatkan dari pengacaranya Made Sudana, yang mengakui memang selama ini Aristya tidak hadir dalam sidang. Bahkan beberapa kali sudah dipanggil untuk bersaksi tetapi mangkir. Atas kondisi ini akhirnya penyidik mengejar ke Sidoarjo dan akhirnya tersangka Aristya ditangkap. "Tidak datang baik-baik, akhirnya ditangkap di rumahnya

di Sidoarjo," ujar pengacaranya Made Sudana.

Dia juga mengatakan selanjutnya atas nama tersangka Aristya akan dilakukan tahap kedua. Yaitu pelimpahan tersangka dan alat bukti. Setelah itu akan diadakan persidangan. Dalam sidang kemarin juga beberapa kali nama Kadis PU Yasa disebut-sebut. "Kasus ini masih terus dikembangkan kok, tersangkanya kayaknya bisa bertambah," jelas Made Sudana.

Seperti halnya berita sebelumnya, Aristya ini adalah rekanan yang menang tender, namun dia menggandeng rekanan lain untuk mengerjakan. Uangnya digarong, tapi pekerjaannya orang lain garap. Atas kondisi ini, proyek ini ngadat. Karena uang tidak mai dikucurkan ke rekanan yang ngesub. (art/yes)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 31



WIDIADNYANA/RADAR BALI

MALING: I Nyoman Juniada, saat digiring jaksa menuju mobil tahanan.

Tersangka Korupsi UPPO Ditahan

BANGLI - Ketua Kelompok Tani Bina Winangun, Batur, I Nyoman Juniada yang menjadi tersangka kasus

dugaan korupsi bansos pengembangan unit pengolahan pupuk organik (UPPO) akhirnya dijebloskan ke sel tahanan. Penahanan Juniada dilakukan saat pelimpahan tahap kedua (berkas dan tersangka) dari penyidik Polres Bangli ke penuntut Kejari Bangli dilakukan siang kemarin (10/8).

Setelah pelimpahan selesai sekitar satu jam, sekitar Pukul 14.00, tersangka digiring keluar kantor Kejari dan dimasukkan ke mobil tahanan. Tak banyak komentar yang disam-

paikan tersangka, sebaliknya memilih menyembunyikan wajahnya dari jepretan kamera wartawan.

Kajari Bangli, Ida Ayu K. Retnasari, didampingi Kasi Pidsus Bagus Putra ditemui usai pelimpahan mengungkapkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mendaftarkan perkara ini ke Pengadilan Tipikor Denpasar untuk disidangkan. Dijelaskan, Juniada diduga menyalahgunakan bansos pengembangan UPPO dari Dirjen Sarana Prasarana, Kementerian Per-

tanian pada 2012. Bansos tersebut diterima Kelompok Tani Bina Winangun yang mestinya dipakai untuk pengolahan pupuk, namun malah digunakan tersangka membayar kredit, membayar tenaga buruh, dan membuat sekretariat kelompok. Penggunaan itu juga tidak dilengkapi bukti kuitansi atau pun data pendukung lainnya. Dari audit BPKP, total kerugian mencapai Rp 340 juta. Juniada pun dijerat dengan pasal 2 dan 3 dari UU Tipikor. (wid/yor)

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015
Hal : 25



Radar Bali



MIFTAHUDDIN/RADAR BALI

SIDANG TIM 9: (ki-ka); terdakwa Ketut Janapria, AA Sagung Mastini, dan Made Ngurah usai pledoi di Pengadilan Tipikor Denpasar, kemarin.

Tuntutan Dianggap Elang Bersayap Satu

Pledoi Tim 9 Atas Tuntutan Jaksa

DENPASAR - Tuntutan terhadap para terdakwa Tim Sembilan dalam kasus Dermaga Gunaksa, dianggap elang bersayap satu. Hal itu disampaikan para pengacaranya dalam menyampaikan pledoi di Pengadilan Tipikor Denpasar, Senin (10/8). Untuk itu Simon Nahak dkk yang mendampingi para terdakwa minta bebas atau lepas (onslag) dalam kasus tersebut.

Melalui tim pengacaranya Simon Nahak dkk, mereka mengatakan bahwa proses penanganan kasus korupsi ini sudah cacat sejak dilakukan pembacaan dakwaan ■

► Baca *Tuntutan...* Hal 31

Edisi : Selasa, 11 Agustus 2015

Hal : 21



Minta Dibebaskan atau Onslag

■ TUNTUTAN...

Sambungan dari hal 21

"Dakwaan itu wajib menyampaikan dakwaan primer dan subsider. Dalam kasus ini malah hanya mengejar subsidernya saja. Ini bagaikan burung elang bersayap satu. Jelas akan jatuh (gugur tuntutananya, Red)," ungkap Simon Nahak.

Dia juga mengatakan bahwa, sudah dipastikan tidak menguntungkan diri sendiri lantaran tidak ikut merasakan duit dari kerugian negara. "Sudah pasti tidak merasakan kerugian negara," ungkapnya. Jika disebutkan menguntungkan orang

lain, jelas - jelas juga yang dimaksud menguntungkan orang lain yaitu Mantan Bupati Wayan Candra kasusnya saat ini belum berkekuatan hukum tetap.

"Kasus Candra belum berkekuatan hukum tetap masih ada proses banding. Apa jadinya kalau nanti dinyatakan tidak salah. Itu artinya menguntungkan orang lain tidak terbukti," ungkapnya.

Atas kondisi ini pihaknya meminta bebas atau onslag (lepas, tidak terbukti perbuatan pidananya, Red). "Kami memohon agar bebas atau onslag," ungkap Simon Nahak. Atas kondisi ini sidang akan dilanjutkan dengan agenda replik atau tanggapan jaksa

atas pledoi. Yang akan diagendakan hari ini.

Untuk diketahui, sembilan terdakwa kasus ini dibagi menjadi tiga kali sidang. Untuk yang pertama terdakwa Ketut Janapria selaku Sekkab Klungkung yang adalah Ketua Tim 9, Asisten I Bidang Pemerintahan yang adalah Wakil Ketua I tim 9 Made Ngurah dan Kepala BPN Klungkung yang adalah Wakil Ketua II Sagung Mastini. Tiga terdakwa ini sidangnya dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Beslin Sihombing, dengan Hakim Anggota Hartono dan Sumali. Yang membacakan tuntutan adalah JPU AA Putra cs. Sedangkan untuk pengacara semuanya sama, yaitu Simon Nahak cs. (art/yes)